



“SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG”

Dhoni Widiyanto
Inspektur Pembantu Khusus

INPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Kamis, 9 September 2021

OUTLINE

- ❖ Regulasi
- ❖ Latar Belakang Benturan Kepentingan
- ❖ Jenis & Sumber Benturan Kepentingan
- ❖ Identifikasi Benturan Kepentingan
- ❖ Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan
- ❖ Mekanisme Pengenaan Sanksi
- ❖ Monev Benturan Kepentingan
- ❖ Pengendalian & Pengawasan



REGULASI

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- ❑ Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- ❑ Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- ❑ Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
- ❑ Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi diLingkungan Kementerian PAN dan RB-RI
- ❑ Peraturan Menteri PAN dan RB No. 10 tahun 2019 tentang Perubahan Permpen PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
- ❑ Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Prov. Jawa Tengah

MENDORONG PELAKSANAAN EVALUASI

1. REFORMASI BIROKRASI
2. ZONA INTEGRITAS
3. AKUNTABILITAS KINERJA



Effective

3 SASARAN REFORMASI BIROKRASI



**Pemerintah yang bersih,
akuntabel, dan berkinerja
tinggi**



**Pemerintah yang
efektif dan efisien**



**Pelayanan publik yang baik
dan berkualitas**



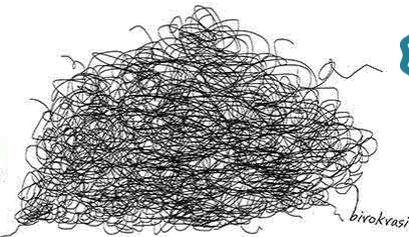
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah



Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien



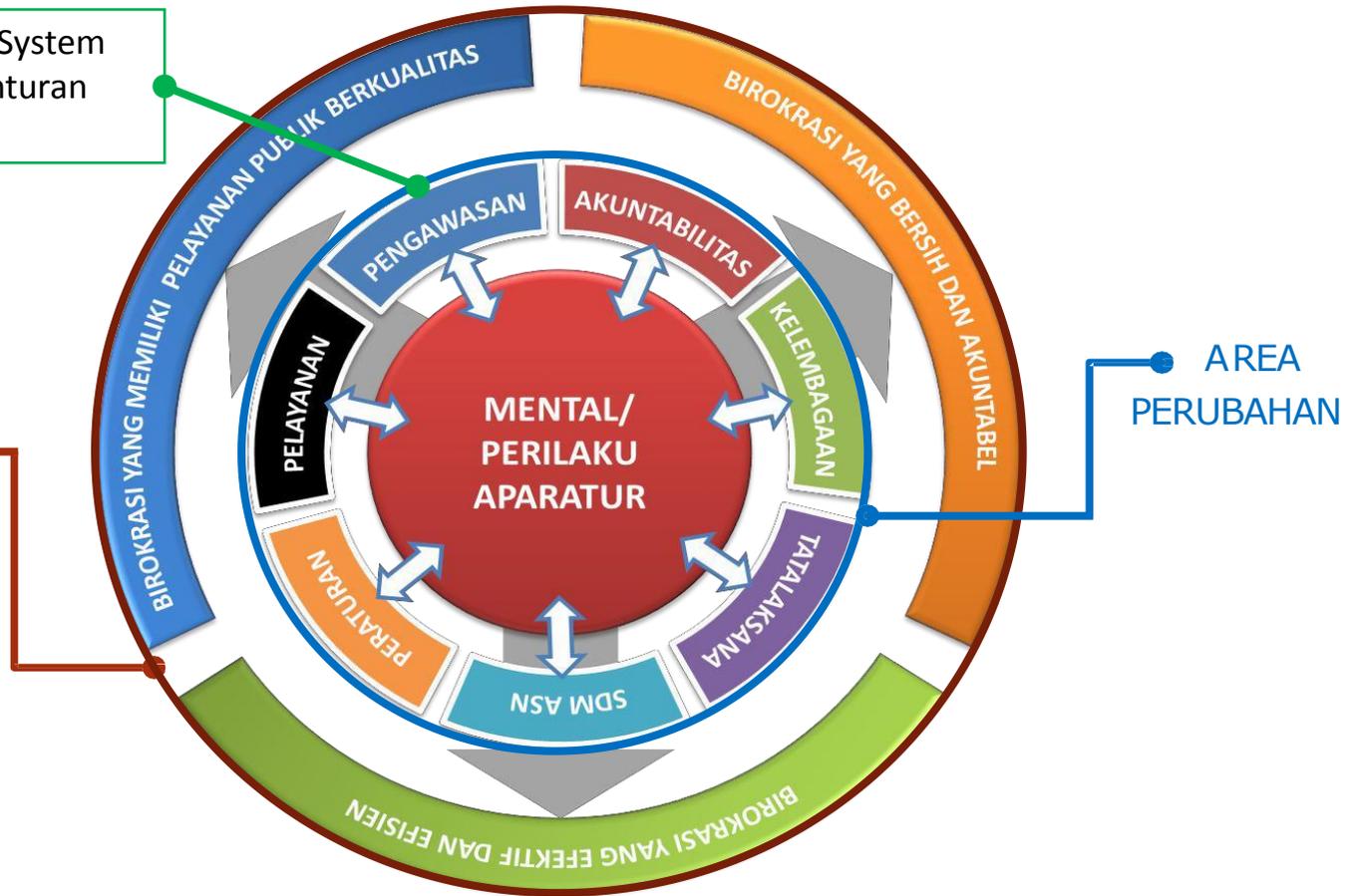
Pelayanan Publik Masih Buruk



KETERKAITAN SASARAN RB DENGAN AREA PERUBAHAN

1. Whistleblowing System
2. Penanganan Benturan Kepentingan

SASARAN REFORMASI BIROKRASI



PENGUATAN PENGAWASAN

TUJUAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

TARGET

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara

Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara

Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

Meningkatnya sistem Integritas dlm upaya pencegahan KKN

PEMENUHAN

1. Pengendalian gratifikasi (*public campaign*, implementasi)
2. Penerapan SPIP (lingk. pengendalian, penilaian resiko, kegt. pengendalian, komunikasi dan implementasi SPI)
3. Pengaduan masy. (implementasi kebijakan, TL hsl penanganan pengaduan, monev dan TL hsl evaluasi)
4. WBS (penerapan, evaluasi dan TL hsl evaluasi penerapan)
5. Penanganan benturan kepentingan (identifikasi, sosialisasi, implementasi, evaluasi dan TL hsl evaluasi)
6. Penyampaian LHKPN (kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN)

PENGERTIAN

1

Benturan Kepentingan

Suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat/PNS dalam melaksanakan tugas

2

Pelanggaran

Perbuatan atau tindakan yg bertentangan dg peraturan Per-UU-an, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yg baik

3

Whistleblowing System

Sistem yg disediakan bg ASN yg memiliki informasi & ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran di lingkup Pemda/Unit kerja

Tujuan Penanganan Benturan Kepentingan

Budaya Kerja

- Ciptakan budaya kerja yg dpt mengenali, mencegah, & mengatasi situasi BK tanpa mengurangi kinerja ASN

Integritas

- Tegakkan integritas ASN

Kendali Mutu

- Cegah terjadinya pengabaian KM atas pelaksanaan tupoksi unit kerja & cegah timbulnya kerugian keu neg/da

Pemerintahan yg Bersih

- Ciptakan pemerintahan yg bersih & akuntabel

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN (1)

1

- **Gratifikasi**

Situasi yg menyebabkan pejabat/ASN menerima gratifikasi atas suatu keputusan yg menguntungkan pihak pemberi

2

- **Penyimpangan Penggunaan Aset**

Situasi yg menyebabkan penggunaan aset pemerintah yg berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi/golongan

3

- **Membocorkan rahasia**

Situasi yg menyebabkan informasi rahasia jabatan/pemerintah dipergunakan utk kepentingan pribadi/golongan

4

- **Rangkap Jabatan**

Situasi perangkapan jabatan yg memiliki hubungan langsung/tidak langsung sejenis atau tidak sejenis shg dpt menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan utk kepentingan jabatan lainnya

5

- **Pelanggaran Prosedur**

Situasi dimana Pejabat/ASN memberikan akses khusus kpd pihak tertentu utk tidak mengikuti prosedur & ketentuan yg berlaku

6

- **Pengaruh thd Pihak yg diawasi**

Situasi dimana menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dg prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yg diawasi

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN (2)

1

- **Kewenangan Penilaian**

Situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi merupakan hasil dari si penilai

2

- **Pengaruh dalam Keputusan**

Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi oleh pihak lain yg membutuhkan

3

- **Penyalahgunaan Wewenang**

Situasi yg memungkinkan penggunaan diskresi yg menyalahgunakan wewenang

4

- **Pemberian Informasi dlm Proses PBJ**

Situasi yg memberikan informasi lebih dari yg telah ditentukan, keistimewaan, peluang bg calon penyedia B/J utk menang dlm proses PBJ

5

- **Bekerja di kantor lain
(Moonlighting/outside employment)**

Situasi bekerja lain diluar pekerjaan kantornya kecuali telah sesuai dg ketentuan yg berlku di pemda

6

- **Hubungan Afiliasi/kekeluargaan**

Situasi dimana tdp hub afiliasi/kekeluargaan dg pihak lain yg memiliki kepentingan atas keputusan sehubungan dg jabatannya

Sumber Penyebab
Terjadinya
Benturan
Kepentingan

1

Kepentingan Pribadi (*Vested Interest*).

2

Hubungan Afiliasi.

3

Gratifikasi

4

Kelemahan Sistem Organisasi.

5

Perangkapan Jabatan

PECEGAHAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

- Identifikasi & Laporkan
- Telaah Awal & Rekomendasi Pencegahan
- Pemetaan oleh OPD

Pejabat/ASN yg berpotensi menghadapi benturan kepentingan dlm tugasnya, wajib mengidentifikasi & melaporkan potensi benturan kepentingan & penyebab kpd atasan langsung

Atasan yg menerima laporan melakukan telaah awal thd potensi benturan kepentingan tsb & merekomendasikan tindakan pencegahan

Seluruh OPD diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan tupoksi mencakup : Uraian BK, Pejabat/ASN/Penyebab & Prosedur Penanganan.

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1

- ASN/Pejabat yg dirinya berpotensi /telah berada dlm situasi benturan kepentingan **dilarang** utk meneruskan kegiatan tsb

2

- ASN/Pejabat yg dirinya berpotensi /telah berada dlm situasi benturan kepentingan wajib membuat **Surat Pernyataan** kpd atasan langsung

3

- ASN/Pejabat juga wajib wajib membuat **Surat Pernyataan** apabila ada hubungan darah dg atasan langsung/pejabat yg berwenang

4

- Perangkapan jabatan yg berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat yg dimungkinkan utk dilaksanakan selama terdapat kebijakan & regulasi di Pemda yg mengatur mengenai hal tsb

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



MONEV & PENGAWASAN



Evaluasi Internal

Masing-masing OPD melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.



Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kepada seluruh OPD akan dikoordinasikan oleh Inspektorat



Jadwal

Waktu dan jadwal monitoring akan diatur oleh Inspektur



Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.



- **Inovasi :**
Pengembangan
Aplikasi si-
Beken



- **Admin :**
Pembentukan
Admin Si-
Beken

- **STEP 2**

- **STEP 3**

- **STEP 4**

- **STEP 1**

- **STEP 5**



- **Kebijakan :**
Pergub
Jateng No.
46 Th 2020



- **Sosialisasi :**
Sosialisasi
Aturan &
Aplikasi



- **Identifikasi :**
Inputing
Identifikasi
BK di setiap
SKPD oleh
Admin Si-
Beken

• IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



- **PEMERINTAH PROV. JATENG**



- **Penanganan :**
Jika ada potensi BK di SKPD maka wajib ditangani & dilaporkan



- **Pengawasan APIP :**
Scr periodik APIP melakukan was BK di SKPD

• **STEP 7**

• **STEP 8**

• **STEP 9**

• **STEP 10**

• **STEP 6**



- **Pemetaan :**
Hasil identifikasi oleh SKPD berupa pemetaan BK



- **Monev : SKPD**
wajib melakukan monev internal



- **Laporan :**
APIP melaporkan hasil was Penanganan BK di SKPD

• IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PEMERINTAH PROV. JATENG

KANAL APLIKASI BENTURAN KEPENTINGAN (SI-BEKEN)



GUBERNUR JAWA TENGAH

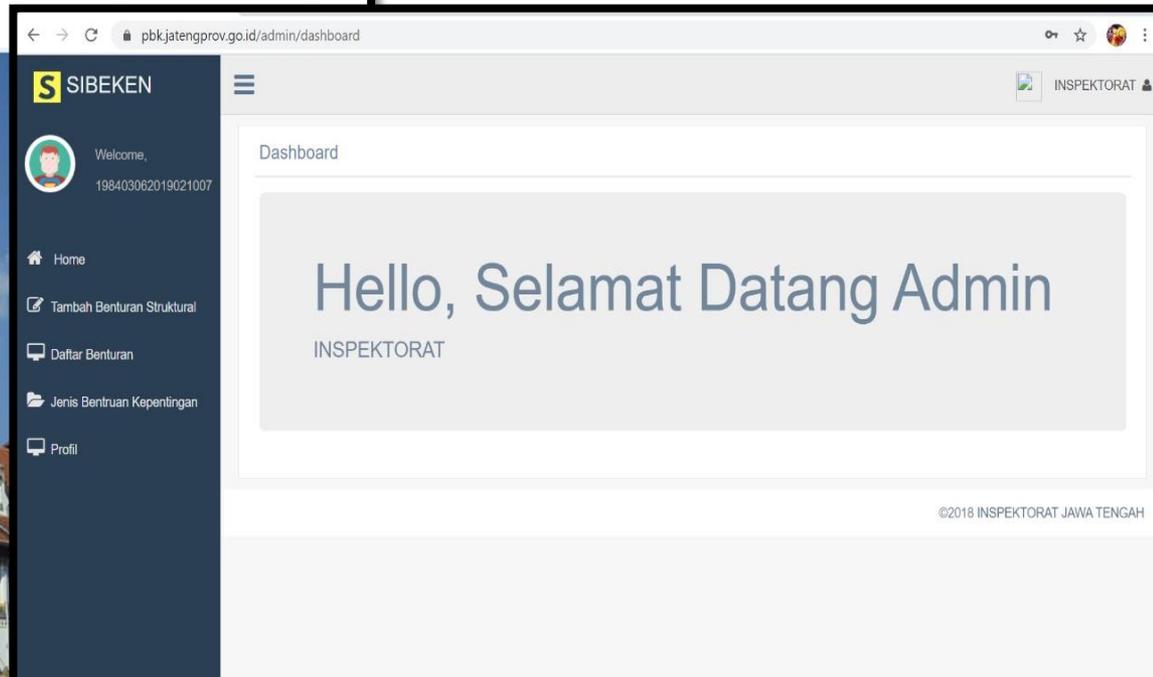
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi diperlukan pedoman yang membantu unit kerja dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa



SIBEKEN

Welcome,
198403062019021007

- Home
- Tambah Benturan Struktural
- Daftar Benturan
- Jenis Benturan Kepentingan
- Profil

Form Benturan Kepentingan Pada Jabatan Struktural

INSPEKTORAT

SKPD: INSPEKTORAT

Bidang/Bagian/Balai: Pilih Bidang/Bagian

Subbagian/Seksi:

Jenis Benturan: KEPENTINGAN PRIBADI

Detail Benturan Kepentingan:

Penyebab: HUBUNGAN AFILIASI

Upaya Pencegahan: GRATIFIKASI

KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI

PERANGKAPAN JABATAN

Cancel Submit

SIBEKEN

Welcome,
197507132003122005

- Home
- Tambah Benturan Struktural
- Daftar Benturan
- Jenis Benturan Kepentingan
- Profil

Form Benturan Kepentingan Pada Jabatan Struktural

RSUD KELET

SKPD: RSUD KELET

Bidang/Bagian/Balai: BID. PELAYANAN & KEPERAWATAN UMUM

Subbagian/Seksi: SEKSI PELAYANAN & PENUNJANG

Jenis Benturan: KEPENTINGAN PRIBADI

Detail Benturan Kepentingan: Pemanfaatan aset BMD yang tidak sesuai peruntukan, alokasi BMN ya

Penyebab: Penggunaan aset oleh pihak LAIN

Upaya Pencegahan: Perlu SOP dan monev secara periodik untuk pemeriksaan penggunaan

Cancel Submit

©2018 INSPEKTORAT JAWA TENGAH

Contoh Hasil Identifikasi melalui Si-Beken

DAFTAR KEMUNGKINAN BENTURAN KEPENTINGAN DI SKPD PEMPROV JATENG

SKPD	Benturan	Detail	Pencegahan
DINAS PERHUBUNGAN	KEPENTINGAN PRIBADI	SPJ Perjalanan Dinas Tidak Benar	Setiap kegiatan dinas harus ada Nota Dinas dan data dukung
DINAS PERHUBUNGAN	KEPENTINGAN PRIBADI	Penggunaan Kendaraan Dinas dan Aset Lainnya Bukan Untuk Kepentingan Operasional Dinas	Menerbitkan Peraturan Kepala Dinas Terkait Penggunaan aset
DINAS PERHUBUNGAN	HUBUNGAN AFILIASI	Kecenderungan untuk membuat persyaratan mengarah ke satu penyedia barang/jasa	Dinas melakukan pengendalian dengan penanaman nilai-nilai integritas
DINAS PERHUBUNGAN	HUBUNGAN AFILIASI	Pengadaan Barang/Jasa Tidak Efisien	Pembentukan Tim Teknis pendukung PPKom
DINAS PERHUBUNGAN	HUBUNGAN AFILIASI	Usulan Pengadaan Barang oleh Pejabat Pengusul Tidak dilakukan Verifikasi secara cermat	Perpres No.16 Tahun 2018
DINAS PERHUBUNGAN	KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI	Usulan Pengadaan Barang oleh Pejabat Pengusul tidak di lakukan verifikasi secara cermat	Melakukan verifikasi usulan kegiatan secara internal oleh Subag Programdan Eksternal dengan Bappeda dengan kesesuaian program/kegiatan dengan Renstra dan RKPD
DINAS PERHUBUNGAN	KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI	Nilai kegiatan tidak wajar serta terdapat usulan kegiatan dari pejabat pengusul tidak memperhatikan analisis standar belanja (ASB)	SK Kepala Dinas Perhubungan No. 027/42/2019 Tanggal 25 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
DINAS PERHUBUNGAN	KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI	Petugas Penyusun RKA SKPD tidak memperhatikan target output dalam Renja SKPD	Aplikasi e-budgeting yang terkoneksi dengan aplikasi Renja SKPD
DINAS PERHUBUNGAN	PERANGKAPAN JABATAN	Kecenderungan Penunjukan Jabatan PLH/PLT Tidak Memperhatikan Pencapaian Outcome Dinas dan Usulan PLH/PLT Cenderung Melihat Aspek Personil	Segera diterbitkan Peraturan Kepala Dinas Terkait SOP Penetapan PLH/PLT Pada Suatu Jabatan
DINAS PERHUBUNGAN	KEPENTINGAN PRIBADI	SPJ Perjalanan Dinas tidak benar	Setiap Kegiatan Dinas harus ada Nota Dinas dan data pendukung
DINAS PERHUBUNGAN	KEPENTINGAN PRIBADI	Penggunaan Kendaraan Dinas dan Aset Lainnya Bukan Untuk Kepentingan Operasional Dinas	Menerbitkan Peraturan Kepala Dinas terkait penggunaan Aset
DINAS PERHUBUNGAN	HUBUNGAN AFILIASI	Kecenderungan untuk membuat persyaratan mengarah ke salah satu penyedia barang/jasa	Dinas melakukan pengendalian dengan penanaman nilai-nilai integritas
DINAS PERHUBUNGAN	GRATIFIKASI	Kecenderungan untuk membuat persyaratan mengarah ke salah satu penyedia barang/jasa	Dinas elakukan pengendalian dengan penanaman nilai-nilai integritas
DINAS PERHUBUNGAN	KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI	Penyusunan HPS tidak akurat	Perpres No.16 Tahun 2018
DINAS PERHUBUNGAN	KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI	Penyusunan HPS tidak akurat	Standar Harga Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
DINAS PERHUBUNGAN	KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI	Petugas Penyusunan HPS tidak tepat dalam menghitung biaya langsung personil	Standar kebutuhan tenaga ahli dalam pekerjaan konsultasi bidang transportasi
DINAS PERHUBUNGAN	KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI	PPHP dan Pengawas Lapangan tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan kontrak	Meningkatkan pengawasan oleh PPKom kepada petugas di lapangan

Contoh Hasil Identifikasi melalui Si-Beken

DAFTAR KEMUNGKINAN BENTURAN KEPENTINGAN DI SKPD PEMPROV JATENG

SKPD	Benturan	Detail	Pencegahan
RSUD KELET	KEPENTINGAN PRIBADI	Pemanfaatan aset BMD yang tidak sesuai peruntukan, alokasi BMN yang seharusnya diperuntukkan untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain diluar urusan dukungan pelaksanaan tugas, Aset yang cenderung berpotensi digunakan diluar tuisi antara lain kendaraan, laptop, handphone, tablet, printer, scanner,lcd dan perangkat perkantoran lain termasuk penggunaan sarana kantor untuk keperluan bukan dinas yang dilakukan diluar standar penggunaan yang dibenarkan oleh peraturan	Perlu SOP dan monev secara periodik untuk pemeriksaan penggunaan BMD
RSUD KELET	KEPENTINGAN PRIBADI	Pemanfaatan aset BMD yang tidak sesuai peruntukan, alokasi BMN yang seharusnya diperuntukkan untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain diluar urusan dukungan pelaksanaan tugas, Aset yang cenderung berpotensi digunakan diluar tuisi antara lain kendaraan, laptop, handphone, tablet, printer, scanner,lcd dan perangkat perkantoran lain termasuk penggunaan sarana kantor untuk keperluan bukan dinas yang dilakukan diluar standar penggunaan yang dibenarkan oleh peraturan	Perlu SOP dan monev secara periodik untuk pemeriksaan penggunaan BMD

Jateng
2017



Jateng
Berintegritas
Bersih
Melayani

~ TETEP MBOTEN KORUPSI!
MBOTEN NGAPUSI ~



TERIMA KASIH

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Mawas & Kerja Ikhlas